Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Desk Ketenagakerjaan Kepolisian dalam Penyelesaian Perselisihan
Hubungan
Azkal Azkiya Nugroho, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DESK KETENGAKERJAAN KEPOLISIAN DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Oleh

Azkal Azkiya Nugroho[1] dan Ari Hernawan[2]

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Desk Ketenagakerjaan Kepolisian dalam sistem hukum ketenagakerjaan Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dari hasil pelayanan Desk Ketenagakerjaan Kepolisian dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan berjenis normatif dengan didukung wawancara narasumber.Penelitian hukum ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari berbagai bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data hasil penelitian dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, Kedudukan Desk Ketenagakerjaan Kepolisian dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia bersifat komplementer dan koordinatif, bukan sebagai lembaga pengganti mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kedudukannya berfokus pada penegakan pidana ketenagakerjaan, pelayanan terpadu, dan kolaborasi antar-instansi yang menjadikan Desk Ketenagakerjaan kepolisian sebagai aktor utama dalam penegakan pidana. Kedua, Kepastian hukum pada hasil pelayanan Desk ketenagakerjaan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah tercapai secara prosedural. Akan tetapi, pelayanan Desk Ketenagakerjaan tidak mengambil alih sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sudah ada dan menguatkan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pendekatan pidana.

Kata Kunci: Desk Ketenagakerjaan, Perselisihan Hubungan Industrial, Pidana Ketenagakerjaan

---

[1] Mahasiswa Program Studi Sarjana, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
[2] Guru Besar Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Desk Ketenagakerjaan Kepolisian dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Azkal Azkiya Nugroho, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

JURIDICAL REVIEW OF THE POSITION OF THE POLICE EMPLOYMENT DESK IN THE EMPLOYMENT LAW SYSTEM AND THE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES

By Azkal Azkiya Nugroho[3] and Ari Hernawan[4]

ABSTRACT

This legal writing aims to determine and analyze the position of the Police Employment Desk within the employment law system. The subsequent objective is to determine and analyze the legal certainty of the service results provided by the Police Employment Desk in the settlement of industrial relations disputes.

This research is descriptive in nature and of a normative type, supported by interviews with resource persons. This legal research was conducted through library research using document study to obtain secondary data. The secondary data consists of various legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research data were analyzed and presented descriptively and qualitatively.

SBased on the research, the following results were obtained. First, the position of the Police Employment Desk in the Indonesian employment law system is complementary and coordinative, rather than acting as a substitute institution for the industrial relations dispute settlement mechanism. Its position focuses on the enforcement of employment crimes, integrated services, and inter-agency collaboration, which makes the Indonesian National Police (POLRI) Employment Desk the main actor in criminal enforcement. Second, legal certainty regarding the service results of the Employment Desk in the settlement of industrial relations disputes has been procedurally achieved. However, the Employment Desk services do not take over the existing industrial relations dispute settlement system, but rather strengthen the results of industrial relations dispute settlements through a criminal approach.

Keywords: *Employment Desk, Industrial Relations Disputes, Employment Criminal Law*

[3] *Undergraduate Student, Departmentof Civil Law, Facultyof Law, Universitas Gadjah Mada*
[4] *Professor at Department of Civil Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada*